

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS
MASJID MELALUI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT
TAMWIL (BMT) DI KABUPATEN AGAM**

(Studi pada Program BMT di Kecamatan Tanjung Raya Kenagarian Tanjung Sani)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

MUHAMMAD SYAHIBUL AZHARI

05 193 049



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

ABSTRAK

Muhammad Syahibul Azhari, Skripsi SI. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Agam (studi pada Program BMT di Kecamatan Tanjung Raya. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 117 halaman, 12 buku, 4 skripsi, 6 website, 3 modul.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Masjid melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Agam dalam mengentaskan kemiskinan yang dilatarbelakangi evaluasi yang dilakukan terhadap program pengentasan kemiskinan. Peneliti tertarik melihat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui koperasi Syariah ini dalam upaya memberdayakan masyarakat ekonomi lemah. Sehingga yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (PKBM KJKS BMT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Agam (studi Program BMT di Kecamatan Tanjung Raya). Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis masjid melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Agam serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Tanjung Raya. Teori yang digunakan adalah Teori Van Meter dan Van Horn.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik keabsahan data peneliti menggunakan proses triangulasi data. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*.

Kesimpulan dalam penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Agam telah mendirikan KJKS BMT di semua nagari (82 Nagari yang ada di Kabupaten Agam) guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten Agam khususnya di Kecamatan Tanjung Raya. Setelah berjalan semenjak tahun 2007 hingga tahun 2010 ditemukan adanya kendala yang dialami dalam implementasi kebijakan terhadap penanggulangan kemiskinan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yaitu *pertama*, kurangnya sumberdaya baik dari sisi finansial yaitu berupa keterbatasan dana maupun kekurangan sumber daya manusia, *kedua*, komunikasi yang masih kurang optimal antar internal pengurus dan pengelola maupun pemerintah daerah, *ketigat*, faktor lingkungan sosial yang masih menghambat dalam kelancaran penanggulangan kemiskinan, berdasarkan kendala tersebut dan kaitannya dengan teori implementasi Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa pelaksanaan KJKS BMT belum berjalan dengan baik karena ditemukannya kendala yang dialami terhadap implementasi kebijakan KJKS BMT dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Agam.

Saran dalam penelitian ini adalah, *pertama*, perlunya peningkatan dan penambahan sumberdaya serta kompetensi dan konsistensi implementor dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini, *kedua* perlunya melibatkan kembali semua elemen masyarakat dalam memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat atas kesadaran bersama dalam menanggulangi kemiskinan di Nagari yang bersangkutan.

Kata Kunci :Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Tamwil (KJKS BMT), Implementasi Kebijakan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia termasuk negara yang sedang berkembang. Dalam sebuah negara yang sedang berkembang, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Terkadang hal ini menjadi sebuah penghambat bagi negara berkembang untuk maju dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Begitupun Negara Indonesia yang masih berkembang dan butuh penanganan terhadap permasalahan yang terjadi agar bisa setara dengan negara-negara maju.

Hambatan dan tantangan yang dialami negara berkembang khususnya Bangsa Indonesia dalam upaya mempercepat kesejahteraan bagi setiap rakyat Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan yang dialami Indonesia pada tahun-tahun belakangan ini dimana angka kemiskinan mencapai 39 juta jiwa (17.07 persen) dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia¹. Padahal semenjak Otonomi Daerah diberlakukan melalui UU.No.22/1999 dan UU.No.25/1999 (yang dalam perjalanannya direvisi dengan terbitnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagai undang-undang otonomi daerah yang baru), pemerintah daerah kini berwenang dan bertanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun kenyataannya, walaupun otonomi daerah sudah diberlakukan kemiskinan masih tetap ada.

¹ Pidato Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono saat pencaanangan gerakan pengentasan kemiskinan berbasis nagari di Parik Malintang Padangpariaman. Dalam website Sumbar.go.id, di akses Tanggal 7 April 2009

Sadar akibat buruk dari tingginya angka kemiskinan, pemerintah sudah mengupayakan agar kemiskinan dapat ditekan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilaksanakan pemerintah dengan mengakomodasikan berbagai sektor secara sinergis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah semenjak tahun 1983 antar lain² :

- 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Departemen Sosial RI
- 2) Inpres Desa Tertinggal (IDT) dari Departemen Dalam Negeri
- 3) Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes), Kredit kelompok Kepada kelompok Masyarakat (K3M)
- 4) Program Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)
- 5) Program Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera (GEKS) dari BKKBN
- 6) Program perbaikan rumah tidak layak huni dari Departemen Kimpraswil
- 7) Program bantuan pendidikan bagi anak miskin
- 8) Program bantuan pengobatan orang miskin
- 9) Program bantuan beras miskin (Raskin) dari BULOG
- 10) Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah juga telah melakukan berbagai terobosan seperti kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada masyarakat. Dukungan juga dilakukan dengan pemberdayaan aparat dengan mengikutsertakan unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat, lembaga

² Departemen Sosial Republik Indonesia, "Pemetaan Kemiskinan Dan Strategi" dalam website <http://bp.depsos.go.id>, diakses 6 Mei 2009

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan Skripsi ini yaitu mengetahui bagaimana implemementasi kebijakan KJKS BMT serta melihat kendala yang dialami dalam proses implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan hasil penelitian lapangan, dimanakan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang telah berdiri di semua Nagari di Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Penulis menganggap bahwa dengan telah berdirinya BMT di semua Nagari di Kabupaten Agam menunjukkan masyarakat merespon baik keberadaan BMT tersebut. Sehingga adanya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Agam antara tahun 2005, tahun 2006, tahun 2009. Namun tidak diikuti di tingkat Kecamatan. Artinya kebijakan penanggulan kemiskinan ini belum optimal dan merata.

Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas provider kebijakan, masih lemahnya hubungan koordinasi dan komunikasi antar agen pelaksana yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan ini, serta disposisi yang kurang dari provider dan user kebijakan. Selain itu factor lain yang turut mempengaruhi seperti kondisi alam yang kurang mendukung, letak desa dan Kantor BMT yang terpencil, serta mindset masyarakat yang masih belum bisa dirubah.

6.2 Saran

1. Penanggulangan Kemiskinan berbasis masjid (PKBM) melalui Koperasi jasa keuangan syariah BMT baik pihak-pihak yang terkait dalam kelancaran

DAFTAR PUSTAKA

- Yeremniaz, T. Keban, 2004, *Enam dimensi administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Med Press.
- Maryaeni, 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta : hlm 70
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab. Solihin Abdul, 2004. *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirjo, Prajudi, 2005 . *Dasa-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tjiptoherijanto, Prijono dkk, 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rhineka Cipta.
- Rintuh, Cornelis dan Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: CV. Alfabeta
- Skripsi :**
- Trialmaidi, Dedi, 2005. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Nelayan Purus Kota Padang*, Fisip Unand. Padang
- Ramli K.T.Kusumo, 2008. *Kajian Dampak Kebijakan publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di kecamatan TELUK MUTIARA Kabupaten Alor*. Tugas Akhir Program Magister Administrasi Publik. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Jakarta